

## ETNIS DAN PEREMPUAN DI ARAS LOKAL

R. Sigit Krisbintoro<sup>1</sup>, Robi Cahyadi Kurniawan<sup>2\*</sup>

<sup>12</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

\*Email: robicahyadi9@gmail.com

### ABSTRACT

The ethnic group has an influence in local elections at the local level, based on the assumption that this research is conducted. This research was conducted by survey method in all sub-districts in Way Kanan District in Lampung Province. The survey was conducted by Stratified Random Sampling method with 662 samples based on Sugiyono (2006: 93). The survey was conducted from August to September 2015. The survey results show that ethnicity still has a significant effect on the 2017 in Way Kanan local election, especially on Lampung ethnic and Javanese ethnic. The Survey results also show that the role of candidate's wives to female voters has an influence, although not too great.

**Keywords:** ethnicity, power, elections, women

### ABSTRAK

Etnis memiliki pengaruh dalam pemilihan kepala daerah ditingkat lokal, berdasarkan asumsi itulah penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey di seluruh kecamatan pada wilayah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Survey dilakukan dengan metode penarikan sampel *stratified random sampling*, dengan jumlah sampel 662 dengan metode sampel berdasarkan perhitungan dari Sugiyono (2006:93). Survey dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan September 2015. Hasil survey memperlihatkan bahwa etnis masih berpengaruh signifikan pada pemilukada Way Kanan 2015 lalu terutama pada etnis Lampung dan Etnis Jawa. Hasil Survey juga memperlihatkan bahwa peran istri-istri kandidat terhadap pemilih perempuan memiliki pengaruh walau tidak terlalu besar.

**Kata Kunci :** etnis, kuasa, pilkada, perempuan

### PENDAHULUAN

Dalam konteks pemilukada, hubungan antara kontestan dengan pemilih adalah hubungan yang tidak stabil, karena semakin kritisnya masyarakat dan semakin luntarnya ikatan tradisional maupun primordial. Kontestan tidak akan bisa memenangkan persaingan politik tanpa mendapatkan dukungan pemilih. Tentunya tidak mengherankan apabila menjelang pemilu, kontestan

beramai-ramai mendekati pemilih agar memberikan suaranya. Hubungan pasif seperti ini, seperti yang telah diungkapkan, membuat pemilih menjadi objek politik.

Pemilihan Umum di Indonesia merupakan sarana penyaluran aspirasi yang paling efektif di tengah kondisi masyarakat yang sulit untuk menyalurkan aspirasinya. Setelah Orde Baru reformasi kehidupan politik di

Indonesia banyak mengalami perubahan dan keterbukaan. Rakyat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan politik di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Perwujudan kedaulatan rakyat yang dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui azas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia Desember 2015 lalu, khususnya di Provinsi Lampung dilakukan pada 8 kabupaten/kota.

Penelitian ini dilakukan di Way Kanan, tiga bulan sebelum pemilukada serentak bulan Desember 2015 dilakukan,

fungsinya adalah untuk melihat peta politik sebelum pelaksanaan Pemilukada Way Kanan tahun 2015. Penelitian ini dibatasi dalam konteks etnis masyarakat pemilih, khususnya etnis Jawa dan Lampung, serta peran istri-istri kandidat calon terhadap orientasi memilih pemilih etnis Jawa dan Lampung pada pemilihan perempuan di Way Kanan.

## **METODE**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah survei atau jajak pendapat untuk mengetahui pendapat masyarakat. Survei adalah cara untuk mengetahui pendapat masyarakat atau pilihan pemilih, hanya dengan mewawancarai sedikit orang. Tetapi metode yang dipakai haruslah benar agar sedikit orang itu mewakili (representasi) dari suara banyak orang.

Survey ini memakai metode penarikan sampel *Stratified Random Sampling*. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang heterogen (tidak homogen) dan berstrata, baik proporsional maupun tidak. (Sugiyono; 2006:93). Teknik ini cocok untuk mengambil sampel dari populasi yang beragam, baik dari segi jenis penduduk, etnis, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan dan umur responden/sampel yang beragam.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsepsi Etnis**

Secara etimologis, kata etnis (*ethnic*) berasal dari Bahasa Yunani *ethnos*, yang merujuk pada pengertian bangsa atau orang. Acap kali *ethnos* diartikan sebagai setiap kelompok sosial yang

ditentukan oleh ras, adat-istiadat, bahasa, nilai dan norma budaya, dan lain-lain yang pada gilirannya mengindikasikan adanya kenyataan kelompok yang minoritas atau mayoritas dalam suatu masyarakat (Liliweri, 2005).

Para ilmuwan politik memandang konsepsi mengenai hakekat etnisitas dimaknai dua hal. *Pertama*, pembacaan realitas perbedaan bentuk penciptaan, yaitu wacana batas yang bersifat oposisioner dan dikotomis. *Kedua*, suatu konstruksi pemahaman yang didasarkan atas pandangan dan bangunan sosial. Etnis merupakan konsep relasional yang berhubungan dengan indentifikasi diri dan sosial. Dua makna ini bisa kita tarik sebuah pemahaman bahwa etnisitas selalu akan terbaca sebagai realitas perbedaan yang selalu dipandang dikotomis dalam mengidentifikasi diri. Karena itu identitas etnis relatif sulit diubah karena pemahaman ini dibangun di atas persamaan darah (kelahiran), warna kulit, kepercayaan yang mencakup suku, ras, nasionalitas dan kasta.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai etnis yang dikemukakan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa etnis atau kelompok etnis adalah pertama, suatu kelompok sosial yang mempunyai tradisi kebudayaan dan sejarah yang sama, dan karena kesamaan itulah mereka memiliki suatu identitas sebagai suatu subkelompok dalam suatu masyarakat yang luas. Kelompok etnis bisa mempunyai bahasa sendiri, agama sendiri, adat-istiadat sendiri yang berbeda dengan kelompok lain. Yang paling penting para anggota dari

kelompok etnis itu mempunyai perasaan sendiri yang secara tradisional berbeda dengan kelompok sosial lain.

*Kedua*, suatu kelompok individu yang mempunyai kebudayaan yang berbeda, namun diantara para anggotanya merasa memiliki semacam subkultur yang sama. Ketiga, etnis merupakan suatu kelompok yang memiliki domain tertentu yang kita sebut dengan *ethnic domain*. Susane Langer (2001) mengatakan bahwa kerap kali kelompok etnis itu mempunyai peranan dan bentuk simbol yang sama, memiliki bentuk kesenian atau *art* yang sama, yang diciptakan dalam ruang dan waktu mereka.

Pembahasan mengenai identitas etnis sebagai identitas diri seseorang merupakan sesuatu yang relevan dan benar di dalam kehidupan bermasyarakat yang multikultur. Hal ini dimungkinkan agar orang lain memiliki kejelasan tentang siapakah diri kita sebenarnya. Artinya melalui asal-usul itulah setiap orang dapat mendefinisikan tentang -Bagaimana saya berbeda dengan orang lain? dan dari sinilah dapat diketahui -Apakah kita sama dengan orang lain? Dengan demikian keberadaan etnik maupun ras memberikan makna tentang keberadaan kita sebagai manusia yang nyata karena memiliki dan berada dalam konteks sejarah dan konteks sosial (etnis). Kita juga memiliki tipologi yang secara fisik berbeda dengan orang lain (*biological or natuarl category*) (Theodor W. Allen, 1993).

Mengenai konsep ini Charman dan Champion (2002) mengatakan bahwa:

-Identitas diri suatu etnis adalah integrasi dari etnisitas dan perasaan kesamaan ras dalam satu konsep diri. Harus diakui bahwa etnisitas juga merupakan salah satu akibat dari identitas diri yang mengalir dari nilai, tata cara, gaya, dan latar belakang individu seseorang. Identitas etnis tidak mengalir dari opini atau prasangka yang berkembang dalam suatu masyarakat luas. Identitas etnis dibangun dari dalam.¶

Kita bisa mengidentifikasi suatu etnis sekurang-kurangnya melalui karakteristik budaya (sub-kultur). Misalnya ketika kita datang ke suatu negara, orang-orang dalam negara tersebut akan membedakan kita pendatang (*other*) dengan mereka (orang-orang) di negara itu sendiri. Bahkan di negara tersebut mereka juga membedakan diri mereka sebagai -penduduk asll¶ dengan -keturunan¶. Jadi secara esensial orang-orang sadar akan adanya perbedaan identitas melalui pemahaman *self* dan *other*.

### **Identitas Etnis dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik (pilkada) sangat dimungkinkan dan kian mengemuka dalam praktek politik sehari-hari. Seperti yang ditafsirkan oleh ilmuwan yang bergelut dalam wacana politik identitas yaitu Agnes Heller yang mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Sedangkan Donald L

Morowitz (1998) pakar politik dari Univeritas Duke mendefinisikan:

-Politik identitas adalah pemberian garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen.¶

Baik Agnes Heller maupun Donald L Morowitz memperlihatkan sebuah benang merah yang sama yakni politik identitas dimaknai sebagai politik keberbedaan. Mereka menjelaskan bahwa politik identitas adalah suatu mekanisme dalam politik yang memberikan batas-batas dalam kategori pembeda bagi mereka yang tidak memiliki rasa persamaan dengan kita yang kemudian ditunjukkan melalui dipilih dan tidak dipilih.

Konsep ini juga mewarnai hasil Simposium Asosiasi Politik Internasional di selenggarakan di Winapada 1994. Pertemuan di Wina tersebut melahirkan dasar-dasar praktik politik identitas. Sementara Kemala Chandakirana (1989) dalam artikelnya *Geertz dan Masalah Kesukuan*, menyebutkan bahwa:

-Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi -orang asll¶ yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi -orang pendatang¶ yang harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya politik identitas sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi alat untuk menggalang politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya.¶

Pemaknaan politik identitas antara Kemala dengan Agnes Heller dan Donald L Morowitz sangat berbeda. Kemala melangkah lebih jauh dalam melihat politik identitas yang terjadi pada tataran praktis. Yang biasanya digunakan sebagai alat memanipulasi, alat untuk menggalang politik guna kepentingan ekonomi dan politik. Namun, pada bagian yang lain argumen Kemala mengalami kemunduran penafsiran dengan mengatakan bahwa dalam politik identitas tentu saja ikatan kesukuan mendapat peranan penting, ia menjadi simbol-simbol budaya yang potensial serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik. Pemahaman ini berimplikasi pada kecenderungan untuk: *Pertama*, ingin mendapat pengakuan dan perlakuan yang setara atau dasar hak-hak sebagai manusia baik politik, ekonomi maupun sosial-budaya. *Kedua*, demi menjaga dan melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan. Terakhir, kesetiaan yang kuat terhadap etnisitas yang dimilikinya.

Kekuasaan dalam Budaya dan Etnis Indonesia memiliki konsepsi kekuasaan yang berbeda dengan literatur-literatur yang berasal dari barat, salah satunya adalah konsepsi kekuasaan Jawa. Konsepsi Jawa tentang kekuasaan berbeda secara radikal dengan konsep yang telah berkembang di barat sejak abad-abad pertengahan, dari perbedaan ini secara logis mengakibatkan perbedaan mencolok pada pandangan terhadap cara kerja politik dan sejarah (Anderson, 2000:42).

Konsepsi kekuasaan dalam kacamata Eropa modern dapat diringkas dalam empat poin: *pertama*; kekuasaan adalah abstrak (dalam arti terbatas atau tidak ada), *kedua*; sumber-sumber kekuasaan adalah heterogen, *ketiga*; penumpukan kekuasaan tidak memiliki batasan inheren, *keempat*; kekuasaan adalah ambigu (Anderson, 2000:43-46).

Konsepsi kekuasaan Jawa berlaku sebaliknya dari apa yang dipaparkan oleh konsep eropa, konsepsi kekuasaan Jawa menurut Benedict R. OG. Anderson (2000:47-50) adalah sebagai berikut; *Pertama* Kekuasaan adalah konkret. Kekuasaan adalah sesuatu yang nyata ada, tidak tergantung pada pihak-pihak yang mungkin menggunakannya, kekuasaan bukanlah suatu postulat teoritis tetapi adalah sebuah kenyataan eksistensial. Kekuasaan adalah tenaga yang tidak tampak, misterius bersifat ilahiyah yang menghidupi semesta. Kekuasaan terejawantahkan kepada setiap aspek alam, batu, pohon, awan, api, dalam pemikiran tradisional Jawa tidak ada pemisahan yang tegas antara benda hidup dan tidak hidup, karena semuanya ditopang oleh kekuasaan yang tak tampak yang sama.

*Kedua*; kekuasaan adalah homogen. Hal ini mengikuti konsepsi bahwa seluruh kekuasaan sama jenisnya dan berasal dari sumber yang sama, kekuasaan ditangan satu individu maupun kelompok adalah sama dengan yang berada di tangan individu dan kelompok yang lain. *Ketiga*; Besarnya kekuasaan didalam semesta adalah konstan. Dalam pandangan Jawa, jagat raya tidaklah berkembang atau menyusut, jumlah total kekuasaan didalamnya pun selalu

tetap. Kekuasaan semata ada, bukan merupakan produk dari organisasi, kekayaan, persenjataan atau apapun yang lain. Kuantitas keseluruhannya tidaklah berubah, meskipun pendistribusian kekuasaan di dalam semesta mungkin beragam. *Keempat*; Kekuasaan tidaklah mempertanyakan keabsahan. Seluruh kekuasaan diturunkan dari sumber tunggal yang homogen, kekuasaan itu sendiri mengatasi pertanyaan baik-buruk, bagi pemikiran Jawa tidak ada artinya mempertanyakan klaim untuk memerintah berdasarkan perbedaan sumber kekuasaan. Kekuasaan tidaklah absah atau tidak absah, kekuasaan itu ada.

Menurut budaya Jawa, kekuasaan diperoleh dengan acara bertapa dan praktek yoga, seperti berpuasa, berjalan tanpa tidur, meditasi, dan tidak melakukan hubungan kelamin dalam jangka waktu tertentu, juga diperoleh dengan mengadakan upacara-upacara kebesaran yang melibatkan banyak orang, objek-objek yang mengandung kekuatan, serta simbol-simbol yang mengandung pengertian mistis. Cara benda-benda, seperti keris, gamelan, kereta kencana, payung kebesaran, atau barang-barang pusaka lainnya, atau mereka yang dipandang mempunyai kesaktian (*kesakten*), seperti pelawak, orang kasim, orang kerdil, peramal, dukun, resi atau orang yang dianggap memiliki kelebihan (Surbakti, 1992:83).

Kekuasaan dalam budaya Jawa diidentifikasi dengan tanda-tanda sebagai berikut; orang yang

lain yaitu dengan mengumpulkan memusatkan kekuatan diri (dengan bertapa), menyerap kekuasaan dari luar (klaim inkarnasi dari dewa), memusatkan di dalam dirinya sendiri hal-hal yang bertentangan<sup>1</sup> serta adanya wahyu,<sup>2</sup> kehadiran kekuasaan sehari-hari dapat dilihat pada wajah orang yang berkuasa yaitu ada tidaknya cahaya (*teja*) pada wajah orang yang berkuasa (Surbakti, 1992:83).

Kekuasaan juga memiliki ciri-ciri sosial yang meliputi kesuburan, kemakmuran, stabilitas dan kemuliaan. Kesuburan dapat dilihat dari jumlah keturunan dan cucu si penguasa, kemakmuran dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat seperti terjaminnya kebutuhan pokok, stabilitas menggambarkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, sedangkan kemuliaan berdasarkan kebesaran dan kejayaan sebuah kerajaan atau negara yang bersangkutan ditandai dengan banyaknya kepala pemerintahan atau kepala negara asing yang mengunjungi negara tersebut (Surbakti, 1992:83).

---

<sup>1</sup> Kemampuan memusatkan hal-hal yang bertentangan dalam dirinya, seperti jenis kelamin (laki-laki dan wanita), pemikiran (nasionalisme, komunisme, nasakom), agama (islam, Kristen, hindu, budha, aliam kepercayaan), dan golongan (militer, partai, daerah).

<sup>2</sup> Wahyu (*devine radiance*), diyakini bisa berpindah, perpindahan wahyu biasanya menandai memudarnya atau jatuhnya suatu dinasti atau rezim.

### **Pemilihan Umum**

Salah satu syarat suatu negara yang menganut paham demokrasi adalah adanya sarana untuk menyalurkan aspirasi dan memilih pemimpin negara dengan diadakannya pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menegakan suatu tatanan politik. Artinya pemilu merupakan mekanisme untuk melakukan pergantian elit politik atau pembuat kebijakan (Laila, 2004:2). Dari pemilu ini diharapkan lahirnya lembaga perwakilan dan pemerintahan. Salah satu fungsinya adalah sebagai alat penegak atau penyempurna demokrasi dan bukan sebagai tujuan demokrasi. Menurut Undang-Undang Pemilu No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum bahwa: Pemilihan umum merupakan

sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia negara yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¶

Sedangkan menurut Karim dalam Dani (2006:11) Pemilihan umum adalah Sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar kebawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat.

Pemilihan umum merupakan sarana legitimasi bagi sebuah kekuasaan. Artinya pemilu merupakan roh demokrasi yang benar-benar merupakan sarana pemberian mandat kedaulatan rakyat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Sebaran Pemilih Etnis Lampung dan Jawa pada Survey Pemilihan Bupati Way Kanan Bulan September 2015

No	Kecamatan	PEMILIH LAMPUNG		37,16%	PEMILIH JAWA		28,39%
		Bustami - Adinata	R.Adipati S – Edward	E Sampel Etnis Lampung	Bustami - Adinata	R Adipati-Edward	E Sampel Etnis Jawa
1.	Blambang Umpu	18 (56,2%)	14 (43,8%)	32	15 (57,7%)	11 (42,3%)	26
2.	Banjit	10 (40,8%)	16 (59,2%)	27	7 (33,3%)	14 (66,4%)	21
3.	Baradatu	10 (41,6%)	13 (54,1%)	24	7 (38,9%)	11 (61,1%)	18
4.	Pakuan Ratu	12 (54,5%)	9 (40,9%)	22	10 (58,8%)	6 (35,3%)	17
5.	Negara Batin	8 (40%)	10 (50%)	20	6 (37,5%)	9 (56,2%)	16
6.	Negeri Agung	12 (60%)	8 (40%)	20	9 (60%)	6 (40%)	15
7.	Kasui	8 (42,1%)	7 (36,8%)	19	6 (42,9%)	5 (35,7%)	14
8.	Gunung Labuan	6 (37,5%)	10 (62,5%)	16	5 (41,6%)	7 (58,4%)	12
9.	Bumi Agung	2 (14,3%)	6 (42,8%)	14	2 (18,2%)	4 (36,4%)	11
10.	Way Tuba	6 (50%)	6 (50%)	12	5 (55,5%)	4 (44,5%)	9
11.	Rebang Tangkas	6 (50%)	5 (41,7%)	12	5 (55,5%)	3 (33,3%)	9
12.	Buay Bahuga	5 (45,4%)	3 (27,3%)	11	4 (50%)	2 (25%)	8
13.	Negeri Besar	3 (27,3%)	5 (45,4%)	11	2 (25%)	4 (50%)	8
14.	Bahuga	2 (33,3%)	4 (66,7%)	6	2 (50%)	2 (50%)	4
	<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>116</b>	<b>246</b>	<b>85</b>	<b>88</b>	<b>188</b>
	<b>%</b>	<b>43,9%</b>	<b>47,1 %</b>	<b>100%</b>	<b>45,2%</b>	<b>46,8%</b>	<b>100%</b>

Tabel 2. Tabel responden pemilih perempuan, dengan pertanyaan pengaruh peran istri terhadap orientasi memilih pemilih etnis Jawa dan Lampung pada Survey Bulan September 2015.

No	Nama Kecamatan	Bustami Zainudin - Adinata	Raden Adipati Surya - Edward	Belum Memilih (Swing Voters)	Menjawab Peran Istri	Jumlah Sampel
1.	Blambangan Umpu	23 (52,3%)	21 (47,7%)		7 (22,5%)	44
2.	Banjit	12 (37,5%)	19 (59,4%)	1 (3,1%)	5 (16,1%)	32
3.	Baradatu	14 (46,7%)	16 (53,3%)		3 (9,7%)	30
4.	Pakuan Ratu	22 (81,5%)	5 (18,5%)		2 (6,5%)	27
5.	Negara Batin	18 (51,4%)	15 (42,9%)	2 (5,7%)	3 (9,7%)	35
6.	Negeri Agung	14 (53,8%)	12 (46,1%)		2 (6,5%)	26
7.	Kasui	9 (50%)	6 (33,3%)	3 (16,6%)	1 (3,2%)	18
8.	Gunung Labuan	6 (26,1%)	17 (73,9%)		2 (6,5%)	23
9.	Bumi Agung	2 (13,3%)	6 (40%)	7 (46,6%)	1 (3,2%)	15
10.	Way Tuba	8 (42,1%)	10 (52,6%)	1 (5,3%)	2 (6,5%)	19
11.	Rebang Tangkas	8 (57,1%)	6 (42,9%)		1 (3,2%)	14
12.	Buay Bahuga	5 (38,5%)	4 (30,7%)	4 (30,7%)	1 (3,2%)	13
13.	Negeri Besar	1 (7,1%)	6 (42,9%)	7 (50%)	1 (3,2%)	14
14.	Bahuga	3 (37,5%)	5 (62,5%)		-	8
	<b>TOTAL</b>	<b>145</b>	<b>148</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>318</b>
	<b>%</b>	<b>45,6%</b>	<b>46,5%</b>	<b>7,9%</b>		<b>100%</b>

## KESIMPULAN

Etnis dalam konteks pemilukada di Way Kanan masih kuat pengaruhnya pada pemilukada Way Kanan 2015, dengan dua etnis utama yaitu etnis Lampung dan Etnis Jawa Kinerja pembangunan yang dilakukan pemerintah kabupaten Way Kanan masih dinilai biasa saja atau jalan di tempat tanpa ada perubahan yang berarti. Salah satu faktornya yaitu tidak meratanya pembangunan yang terjadi, bantuan – bantuan pemerintah banyak yang tidak sampai kepada mereka, kualitas pembangunannya buruk sehingga tidak tahan lama. Persaingan ketat terjadi pada pasangan kandidat Bustami Zainudin-Adinata (281 responden memilih) dan pasangan kandidat Raden Adipati Surya-Edward (305 reponden memilih). Walaupun berdasarkan hasil survey bulan September 2015 pasangan Raden Adipati Surya-Edward unggul dengan selisih suara 3,62 %, masih ada sisa suara yang diperebutkan (*swing voters*), massa mengambang sebesar 11,48%. Faktor peran istri-istri para kandidat pasangan calon terhadap para pemilih perempuan, dengan etnis Lampung dan Jawa bervariasi berdasarkan tabel 2, namun secara keseluruhan peran para istri untuk mempengaruhi pemilih perempuan dengan etnis Jawa dan Lampung tidak terlalu signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo., Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Gaffar, Afan. 1992. *Javanese Voters*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- , 1999. *Politik Indonesia*. Pustaka Jakarta. Jakarta
- Haboddin, Muhtar. 2007. *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*. Jurnal Studi Pemerintahan Universitas Barawijaya: Malang
- Hamid, S. Edy.(ed). 2004. *Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi dan Saran*. Yogyakarta : UII Press
- Kantaprawira. 1995. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Jakarta : Sinar Baru Algesindo
- Kristiadi, J. 1996. *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia*. Prisma. Jakarta
- , 1997. *Menyelenggarakan Pemilu yang Bersifat Luber dan Jurdil*. Jakarta : CSIS
- Liliwari, Alo Prof. Dr., M.S. 2005. *Prasangka dan Konflik*. LKIS : Yogyakarta
- Mandatory. 2005. *Politik Perlawanan*. IRE : Yogyakarta
- Mutakin, Awan.(dkk). 2004. *Dinamika Masyarakat Indonesia*. PT Genesindo
- Prajarta Dirdjosanjata dan Nico L Kana (Penyunting). 2006. *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004*. Pustaka Percik. Yogyakarta
- Rahman, A., H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Rudini. 1991. *Pelaksanaan Pemilu di Indonesia*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta
- Santoso, Topo dan Didik Supriyanto. 2004. *Mengawasi Pemilu*

- Mengawal Demokrasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. IKIP Semarang Press: Semarang
- Sudikin dan Mundir. 2005. *Metode Penelitian*. Insan Cendekia. Surabaya
- Sugiyono. 2006. *Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuntitatif*. CV Alfabeta. Bandung
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta
- Silalahi, Dr. Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama: Jakarta
- Soekanto, Soerjono .1982. *Pengantar Sosiologi*. Rajawali Press: Jakarta